

DAFTAR PUSTAKA

- Antara Riau. 2015. *Pekanbaru Bersiap Diri Sebagai Kota MICE*. <https://www.antarariau.com/berita/59302/pekanbaru-bersiap-diri-sebagai-kota-mice>.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tahun 2013-2017.
- Darmawati. 2008. *Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*. Teroka Riau Vol. VIII, No. 2, hlm. 61-71.
- Erlangga, Dita Dwi. 2017. "Analisis Efektivitas Pajak Hiburan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Daerah. Volume I, No. I 2013.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi: Cetakan Tujuh Belas. Yogyakarta: Andi.
- Putriane. 2017. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2012-2016". *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2000 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2009.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

_____. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

_____. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

_____. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

_____. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

_____. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sari, Nadya Tiara. 2014. "Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*. Jakarta: Indeks Penerbit.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Buku 2*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suandy, Erli. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliartini, Putu Intan dan Ni Luh Supadmi. 2015. "Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10-2 (2015): 489-502*.